

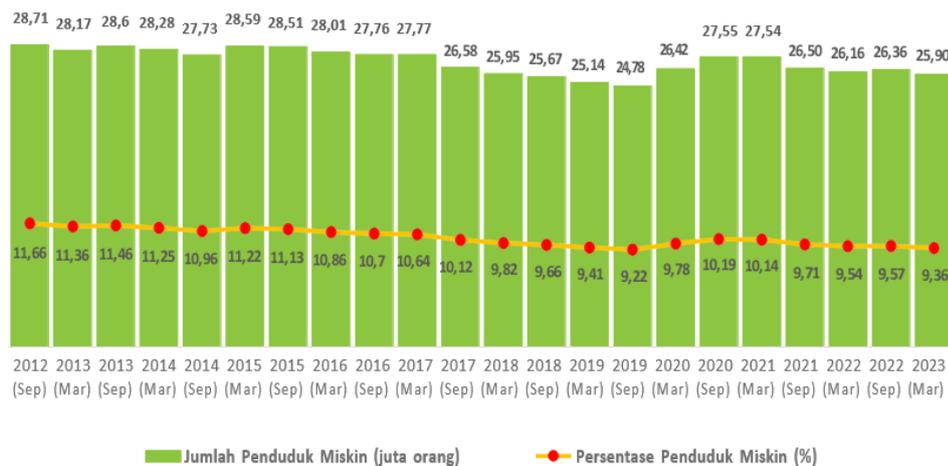
# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup suatu masyarakat. Di Indonesia, kesejahteraan sosial terus menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Pemerintah berupaya mencapai kesejahteraan sosial dengan menciptakan kondisi di mana setiap individu, terutama masyarakat miskin dan rentan, mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan (Sari, 2023).

Secara keseluruhan, dalam rentang waktu antara September 2012 hingga Maret 2023, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Namun, terdapat beberapa periode yang menunjukkan peningkatan angka kemiskinan, yaitu pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Perkembangan tingkat kemiskinan dari September 2012 hingga Maret 2023 dapat dilihat pada Gambar 1 (Badan Pusat Statistik, 2023).



**Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012 – Maret 2023**

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2023.*

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia terus menurun, namun tantangan untuk mencapai kesejahteraan sosial merata masih besar. Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan tercatat 9,36% atau sekitar 26 juta orang. Banyak keluarga juga rentan jatuh miskin akibat perubahan ekonomi, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik, 2023).

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai inisiatif, salah satunya melalui program bantuan tunai bersyarat (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). PKH yang telah berjalan sejak 2007 merupakan bagian dari kebijakan khusus untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. PKH bertujuan membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, agar dapat mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan sosial mereka, sekaligus berperan dalam memutus siklus kemiskinan (Senduk, 2021).

Pemerintah memberikan bantuan pangan kepada KPM secara non tunai setiap bulan melalui Program BPNT. BPNT hanya dapat digunakan untuk membeli makanan di toko yang telah bekerja sama dengan Bank Himbara karena distribusinya menggunakan sistem akun elektronik. Tujuan dari penyaluran BPNT adalah untuk meringankan beban pengeluaran keluarga kurang mampu, yang diatur oleh Presiden Republik Indonesia melalui Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017. Dengan adanya program ini, diharapkan pola pengeluaran rumah tangga akan berubah, dengan peningkatan konsumsi pangan serta kebutuhan non pangan (Julianto, 2020).

Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang sangat beragam. Berdasarkan informasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Cirebon, secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah dataran rendah meliputi Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klenganan, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok, dan

Pabedilan. Sedangkan sebagian wilayah lainnya termasuk dalam kawasan dataran tinggi (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. 2024).

Selain itu, wilayah Kabupaten Cirebon dibagi menjadi tiga bagian, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Pembagian ini tidak hanya penting untuk kepentingan administrasi tetapi juga relevan dalam mengukur distribusi bantuan sosial seperti PKH dan BPNT di berbagai kecamatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018, pembagian wilayah ini dirancang untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih merata, sekaligus memfasilitasi pembangunan dan kesejahteraan di seluruh kecamatan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, 2018).

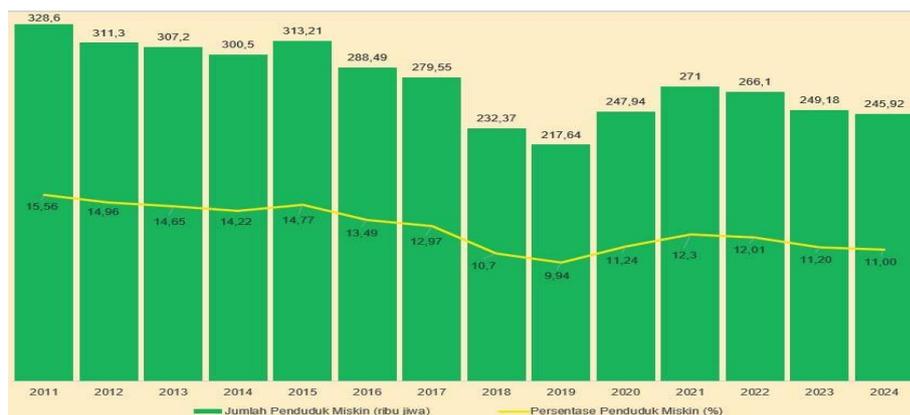
**Tabel 1.1**  
**Pembagian Wilayah Kabupaten Cirebon**

No.	Wilayah	Kecamatan
1.	Barat	Arjawinangun, Palimanan, Kapetakan, Susukan, Kaliwedi, Gegesik, Panguragan, Suranenggala, Ciwaringin, Plumbon, Klangeran, Jamblang, Depok, Dukupuntang.
2.	Tengah	Sumber, Lemahabang, Astanajapura, Mundu, Pangenan, Sedong, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Weru, Beber, Greged, Plered, Gempol, Tengah Tani, Talun, Kedawung, Gunungjati.
3.	Timur	Ciledug, Losari, Pebedilan, Pabuaran, Waled, Babakan, Gebang, Pasaleman.

Sumber: *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, 2018.*

Kabupaten Cirebon memainkan peran penting dalam perekonomian regional karena lokasinya yang strategis, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara dan merupakan salah satu pusat perdagangan di Pantura. Namun, di balik potensi ini, sebagian besar orang menghadapi banyak masalah sosial dan ekonomi. Ini terutama berlaku untuk kesejahteraan masyarakat miskin.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon cenderung menurun, baik dari segi jumlah maupun persentase, dari tahun 2011 hingga 2024. Namun, akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kabupaten Cirebon, pada tahun 2020, angka kemiskinan meningkat. Gambar 2 berikut menunjukkan evolusi tingkat kemiskinan dari tahun 2011 hingga 2024 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2024).



**Gambar 1.2 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, 2011-2024**

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2024.*

Berdasarkan gambar di atas, tingkat kemiskinan di daerah ini masih cukup signifikan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain ketergantungan masyarakat pada sektor informal, seperti pertanian dan usaha kecil, yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan perubahan iklim. Selain itu, sebagian besar masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon tinggal di pedesaan, di mana akses terhadap infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik masih terbatas.

Dalam aspek sosial, Kabupaten Cirebon juga menghadapi tantangan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon hanya mencapai 7,6 tahun. Tingkat pendidikan yang rendah, terutama di kalangan masyarakat miskin, menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Data menunjukkan bahwa terdapat banyak anak-anak di Kabupaten Cirebon yang tidak melanjutkan pendidikan atau berhenti sekolahnya, terutama di daerah pedesaan. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga

masih menjadi kendala, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah terpencil (Handayani, 2024).

Menurut Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, data per Mei 2024 menunjukkan bahwa total penerima PKH mencapai 95.068 KPM, dan total penerima BPNT sebanyak 231.800 KPM. Bantuan ini disalurkan melalui dua saluran utama, yaitu HIMBARA (Himpunan Bank Negara) dan POS. Penerima yang memiliki akses perbankan mendapatkan bantuan melalui HIMBARA, sementara itu, bagi individu yang tidak memiliki rekening bank atau berada di wilayah terpencil menerima bantuan melalui POS (Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya, Sukirno, A. (2019) dalam penelitiannya mengenai pengaruh PKH terhadap kesejahteraan KPM di Kabupaten Bekasi menemukan bahwa PKH memberikan dampak signifikan terhadap akses pendidikan dan kesehatan KPM. Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan tunai yang diberikan oleh program PKH meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengakses fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan pendidikan yang lebih unggul. memadai, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga penerima bantuan. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa PKH berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.

Arif et al., (2020) mengungkapkan bahwa BPNT berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan KPM melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi. Program ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan status gizi dan kesehatan keluarga, yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa program bantuan pangan seperti BPNT sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan keluarga terhadap bantuan sosial lainnya dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, program PKH dan BPNT telah menunjukkan dampak yang cukup positif terhadap kesejahteraan KPM, terutama dalam meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pangan pokok. BPNT, misalnya, berperan dalam memperbaiki kondisi pangan dan gizi keluarga melalui bantuan

non tunai yang memungkinkan KPM memperoleh bahan pangan seperti beras dan telur. Hal ini sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan dan wilayah terpencil yang memiliki akses terbatas ke pasar dengan harga pangan terjangkau (Hasanah & Shofa, 2024).

Namun, dampak dari program PKH dan BPNT tidak selalu seragam di setiap wilayah, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, infrastruktur, sektor ekonomi, kualitas SDM, dan akses pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada delapan kecamatan yang dipilih secara *purposive*, mewakili wilayah barat, tengah, dan timur Kabupaten Cirebon, guna memperoleh gambaran yang lebih representatif terhadap variasi kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Meskipun secara umum program ini telah meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan terutama di wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses pasar, pengaruh jangka panjangnya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Beberapa KPM masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan bantuan secara optimal akibat rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan terbatasnya akses informasi. Selain itu, kontribusi program terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga belum sepenuhnya terlihat, sehingga perlu kajian lebih mendalam agar bantuan sosial ini benar-benar dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan. (Megaartha, 2022).

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kontribusi program PKH dan BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan KPM di Kabupaten Cirebon. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana program tersebut dapat lebih optimal dalam memberdayakan keluarga kurang mampu agar dapat keluar dari kemiskinan. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Cirebon”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

### **1. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian yang menjadi fokus penelitian ini adalah ekonomi pembangunan pada pembangunan daerah dan regional.

### **2. Jenis Masalah**

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah masih belum diketahuinya apakah ada pengaruh atau tidak antara PKH dan BPNT terhadap Tingkat Kesejahteraan KPM di Kabupaten Cirebon.

## **C. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya akan membahas pengaruh PKH dan BPNT terhadap Tingkat kesejahteraan KPM di Kabupaten Cirebon.
2. Wilayah penelitian mencakup wilayah barat (Plumbon, Dukupuntang, Ciwaringin), wilayah tengah (Plered, Talun, Mundu), dan wilayah timur (Babakan, Gebang) di Kabupaten Cirebon.
3. Penelitian ini hanya akan melibatkan KPM yang menerima bantuan PKH dan BPNT secara bersamaan (KPM irisan).
4. KPM yang menjadi fokus penelitian ini adalah mereka yang minimal sudah menerima bantuan PKH dan BPNT selama 2 tahun berturut-turut.
5. PKH yang dibahas dalam penelitian ini mencakup pendataan dan sosialisasi, ketepatan waktu penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan untuk pendidikan dan kesehatan, kecukupan, dan program tepat sasaran.
6. BPNT yang dibahas meliputi penggunaan kemudahan proses administrasi, kesesuaian jadwal distribusi, kesesuaian jumlah, kecukupan bantuan untuk kebutuhan pangan, dan ketepatan sasaran.
7. Variabel tingkat kesejahteraan yang menjadi fokus penelitian ini adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
8. Penelitian ini tidak akan mengkaji faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan KPM di Kabupaten Cirebon.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan KPM di Kabupaten Cirebon, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah program keluarga harapan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Cirebon?
2. Apakah bantuan pangan non tunai berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Cirebon?
3. Apakah program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Cirebon?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program keluarga harapan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bantuan pangan non tunai berpengaruh tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara bersama-sama program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Cirebon.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang otoritas antara lain:

###### **a. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Penulis**

Sebagai media atau sarana untuk menerapkan ilmu, memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mengamati secara langsung tingkat kesejahteraan KPM. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai wadah untuk mengaplikasikan

ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan melalui praktik langsung di lapangan.

2) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat umum tentang pengaruh PKH dan BPNT terhadap tingkat kesejahteraan KPM di Kabupaten Cirebon.

3) Bagi Akademik

Penelitian ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi institusi. Selain itu, hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh PKH dan BPNT terhadap tingkat kesejahteraan KPM di Kabupaten Cirebon.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan landasan teori, kerangka pemikiran, teori yang menguraikan tentang daya tarik wisata, ragam kuliner, promosi dan minat berkunjung wisatawan serta penelitian terdahulu.

**BAB III : Metode Penelitian**

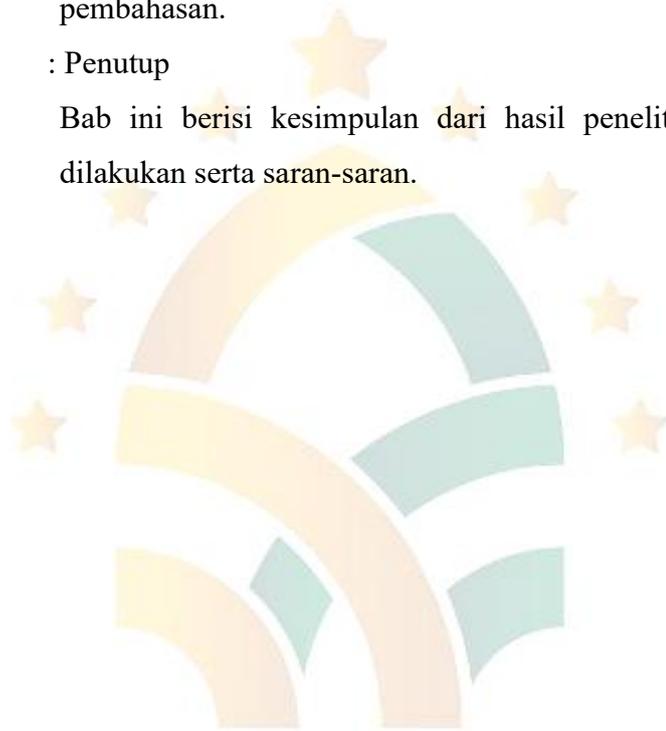
Bab ini menjelaskan landasan teori, kerangka pemikiran, teori yang menguraikan tentang PKH, BPNT, dan tingkat kesejahteraan serta penelitian terdahulu.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, deskripsi responden, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.



**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON